

PROSEDUR PENYITAAAN BARANG JAMINAN PADA PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH DI BPRS BAKTI MAKMUR INDAH KRIAN

1. Sejarah berdirinya PT BPRS Bakti Makmur Indah Krian ¹

Pada tahun 1991 masyarakat di Jawa Timur yang mayoritas beragama Islam telah mulai diperkenalkan dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah berupa Bank Syariah yang dalam operasionalnya mengacu pada Al-Quran dan Hadis.

Sebagian umat yang mengaku Islam dan berniat menjalankan ajaran Islam secara *kaffah*, tentunya dalam segala bentuk kegiatan termasuk dalam melakukan transaksi keuangan ataupun perdagangan

42

PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bakti Makmur Indah dengan kantor pusat yang berkedudukan di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7, Jalan Raya Surabaya-Krian KM 29 Krian-Sidoarjo-Jawa Timur, merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat Syariah pertama di Wilayah Jawa Timur yang didirikan berdasarkan permintaan umat Islam di Jawa Timur akan Lembaga Keuangan Syariah berbentuk Bank yang dalam operasionalnya senantiasa mengacu pada Al-Quran dan Hadith.

Pendirian PT BPRS Bakti Makmur Indah diawali t
yang diprakarsai oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan
muslim serta pejabat pemerintah seperti halnya KH. Zak
KH. Imron Hamzah (alm), DR. H. Tjuk K Sukiadi, SE., I
Noer, HMY Bambang Sujanto, HM. Aldjufri, HM. Sale
(alm), H. Makbul Thohir (alm), dll. Selama proses
mengalami berbagai kendala yang tidak mudah baik
permodalan, perijinan maupun persiapan operasioanal,
bank syariah saat itu relative masih baru dikenal di
sehingga Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang
kebijakan perbankan masih membutuhkan waktu yang c
dalam memberikan ijin pendiriannya.

Misi : Memberikan pelayanan yang Islami dan professional dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadith serta menjadikan PT BPRS Bakti Makmur Indah sebagai BPRS terbaik di Indonesia.

a. Keadilan

b. Kemitraan

c. Transparen

[illegible]

d. Universal

4. Legalitas Perusahaan ⁴

d. NPWP No. 1.546.290.6-603.

[illegible]

penyaluran dana serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama bank.

b. Direktur Utama

- 1) Menjabarkan kebijakan umum bank yang telah dibuat oleh Dewan Komisaris dan disetujui RUPS
- 2) Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi *financial* dan non *financial* disampaikan kepada dewan komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS

c. Direktur Operasional dan Bisnis

- 1) Membantu direktur utama dalam menjabarkan kebijakan umum bank yang telah dibuat oleh Dewan Komisaris dan disetujui RUPS
- 2) Melaksanakan dan memantau kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan SOP.

d. Head Marketing

- 1) Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada peminjam, serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak bermasalah.
- 2) Mengajukan persetujuan pembiayaan pada komite

e. Funding

- 1) Melakukan promosi produk-produk pendanaan bank, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito

- f. Lending

- g. Head Operasional

- ## h. Legal

- i. Teller

- a) Memberikan pelayanan transaksi tunai

1. Prinsip Titipan (Al-Wadi'ah)⁶

a. Tabungan Wadi'ah Haji

[illegible]

d. Tabungan Wadi'ah Qordhiyu

Simpanan/titipan dana dari umat khususnya yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BPRS secara perorangan dalam bentuk tabungan untuk tujuan khusus yaitu pembayaran angsuran, dimana penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan penarikannya hanya dapat dilakukan apabila kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan atas

2. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)⁷

Penempatan dana dari umat secara perorangan ataupun kelompok dalam bentuk tabungan untuk tujuan yang sifatnya umum, dimana penyeteroran maupun penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai ketentuan BPRS dan kepada Penabung akan diberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh BPRS dengan nisbah 50 bagian untuk Penabung dan 50 bagian untuk BPRS. Produk ini menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamānah*.

Penempatan dana dari umat secara perorangan dengan batasan umur maksimal 12 tahun dalam bentuk tabungan untuk kepentingan pelajar ataupun anak sekolah, dimana penyeteroran maupun penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai ketentuan BPRS dan kepada Penabung akan diberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh BPRS dengan nisbah 50 bagian untuk Penabung dan 50 bagian untuk BPRS. Produk ini menggunakan akad *wadī'ah yad adh-dhamānah*.

[illegible]

3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)⁸

Pembiayaan dari BPRS yang diberikan kepada umat yang memiliki proyek/usaha jangka pendek yang potensial didukung pengalaman usaha & keahlian yang cukup matang di bidang tersebut namun tidak memiliki modal untuk menjalankan proyek/usaha tersebut. Pembiayaan tersebut bersifat penempatan modal oleh BPRS kepada umat sebagai mitra usaha dengan dasar/sistem bagi hasil atas perolehan keuntungan/pendapatan dari usaha/proyek yang didanai oleh BPRS, dengan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan BPRS berhak untuk melakukan pemeriksaan/pengawasan atas jalannya usaha/proyek tersebut. Produk ini menggunakan akad *mudharabah*.

Pembiayaan dari BPRS yang diberikan kepada umat yang memiliki proyek/usaha jangka pendek/panjang yang potensial

[illegible]

6. Prinsip Alih Hutang (Al-Hawalah)

Fasilitas yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pengambilalihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS, mengingat nasabah belum mampu untuk membayar sebagai akibat mundurnya tagihan/dana yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan ini diberikan dengan dasar/prinsip pengambilalihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan ujroh/fee dari nasabah yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pinjaman dari BPRS yang diberikan kepada umat yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana pinjaman segera untuk masa yang relatif pendek. Pinjaman diberikan dengan dasar/prinsip pinjam meminjam, dimana BPRS tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari dana yang

[illegible]

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

a. Calon nasabah mengajukan pembiayaan secara langsung ke BPRS Bakti Makmur Indah Krian atau *staff marketing* mendapatkan nasabah dari hasil sosialisasi dengan masyarakat.

b. Setelah itu calon nasabah menyerahkan persyaratan sebagai berikut: Pas photo 3x4 1 lembar, foto copy KTP pemohon, foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Slip Gaji dan atau surat keterangan kerja, , serta surat-surat yang akan dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan.

c. Calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan

d. Staff *Accounting Officer* melakukan *survey* usaha dan jaminan.

Kemudian dibuatkan proposal dan analisa usaha berdasarkan hasil *survey* di lapangan .

e. Proposal dan seluruh berkas pembiayaan lainnya diserahkan ke bagian *Legal Officer* untuk proses akad pembiayaan.

[illegible]

- f. Staff *Legal Officer* melakukan taksiran harga atas barang jaminan yang diajukan oleh nasabah.
- g. Membuat perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya yang terkait dengan pembiayaan nasabah
- h. Menghubungi nasabah untuk menyampaikan waktu akad dan pencairan pembiayaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persyaratan pencairan pembiayaan
- i. Setelah dilakukan akad dan pencairan pembiayaan, nasabah menyerahkan dokumen jaminan asli dan dicatat dalam register
- j. Membuat slip pencairan pembiayaan, dan meminta persetujuan kepada pejabat yang ditunjuk.¹²

2. Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah yang Terjadi di BPRS Bakti Makmur Indah Krian

Pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah, berikut keterangan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Pak Mohammad Mahdy Dzikrullah sebagai staff *Accounting Officer* di BPRS Bakti Makmur Indah Krian “yang paling banyak diminati nasabah adalah pembiayaan *murābahah* karena akadnya sederhana, mudah dalam penerapan dan resiko pembiayaannya kecil”.¹³

¹² Ibid.

¹³ Mohammad Mahdy Dzirkullah, Wawancara, Sidoarjo 22 Desember 2016.

Dari wawancara dengan Pak Mahdy, beliau menceritakan pembiayaan *murābahah* yang diajukan oleh Pak Hariadi

Selanjutnya Pak Mahdy juga menceritakan kepada penulis kronologi terjadinya pembiayaan *murābahah* bermasalah,

¹⁴ Ibid.

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua yaitu; faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa dari BPRS dan juga bisa dari nasabah yang mengajukan pembiayaan. Faktor eksternal yaitu terjadi karena diluar wewenang BPRS atau nasabah misalnya terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau tanah longsor.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Mahdy faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murābahah* bermasalah ada pada faktor internal baik dari BPRS maupun dari nasabah.

“Faktor internal dari BPRS yaitu kurangnya pengawasan terhadap barang jaminan sehingga nasabah menyalahgunakan barang jaminan tersebut. Sedangkan faktor internal yang dari nasabah adalah watak atau karakter dari nasabah itu sendiri, meskipun sudah kita lakukan analisis pembiayaan yang namanya karakter seseorang sulit ditebak”.¹⁷

[illegible]

Disini penulis menanyakan kepada narasumber Pak Mahdy tentang bagaimana prosedur penyitaan barang jaminan yang dilakukan di BPRS Bakti Makmur Indah Krian. Jawaban dari Pak Mahdy sebagai berikut,

“Jika ada nasabah mengalami penunggakan pada bulan pertama masih diberikan kelonggaran. Keterlambatan di bulan kedua baru kami datangi ke rumah nasabah yang mengalami penunggakan. Disitu kami lakukan pembinaan agar nasabah mau membayar angsuran. Kami beri jangka waktu seminggu untuk membayar, jika tidak membayar maka kita buat surat teguran maksimal sebanyak tiga kali. Jika sampai jangka waktu yang sudah ditentukan nasabah tersebut masih tidak membayar maka ada Surat Peringatan I (SP I). Sampai pada Surat Peringatan III (terakhir) juga tidak dihiraukan maka dilakukan pemanggilan kepada nasabah. Kami berikan kesempatan untuk menyelesaikan pinjaman beserta dendanya. Hingga batas akhir ternyata nasabah tidak dapat mengembalikan, maka nasabah diberi kesempatan lagi untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengembalian pembiayaan. Akan tetapi bila sampai perpanjangan jangka waktu nasabah masih tidak mampu untuk membayar maka pembiayaan tersebut diklasifikasikan sebagai pembiayaan bermasalah. Kalau terjadi pembiayaan bermasalah kita lakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Nanti barang jaminannya kita jual secara terbuka (lelang) dari hasil penjualan barang jaminan tadi kita gunakan untuk melunasi hutang nasabah yang menunggak, apabila masih sisa kami kembalikan kepada nasabah”.¹⁸

[illegible]

Selanjutnya penulis menanyakan tentang bagaimana prosedur penyitaan barang jaminan yang dilakukan oleh BPRS Bakti Makmur Indah Krian,

Dari hasil wawancara dengan pihak BPRS bakti makmur Indah Krian dan Pak Hariadi sebagai nasabah , dapat diketahui bahwa BPRS Bakti Makmur Indah Krian hanya memberikan peringatan secara lisan saja kepada Pak Hariadi tidak melampirkan peringatan secara tertulis.

[illegible]

“Saya tidak membayar angsuran pada bulan ketiga setelah pencairan, karena waktu itu masih belum ada uang untuk membayar. Sampai bulan selanjutnya pihak BPRS mendatangi rumah saya untuk menagih angsuran, namun masih belum ada uang karena banyaknya kebutuhan keluarga saya saat itu. Pihak BPRS masih memberikan waktu untuk membayar. Hingga bulan ketiga saya tidak membayar sehingga saya diberi surat peringatan I (SP I), dan setelah adanya SP I tersebut saat ada uang segera saya bayarkan.”²¹

“Saya waktu itu menunggak pembayaran selama 5 bulan, dari bulan Maret sampai dengan Agustus. Hingga dapat surat peringatan III (SP III) dari BPRS Bakti Makmur Indah Krian. Karena tidak ingin barang jaminan saya diambil oleh BPRS maka saya lunasi semua angsuran beserta dendanya”.²²

²¹ Parnoto, Wawancara, Sidoarjo 22 Mei 2017.

[illegible]

